

**Pandemi Covid 19 dan Perubahan Pola Pembayaran dalam Industri
Pariwisata di Kabupaten Banyumas Berbasis
Cashless Management System**

**Muhammad Yamin, Ratna Ningtyas, I Putu Arya Aditia Utama
Universitas Jenderal Soedirman**

**Email : muhammad.yamin@unsoed.ac.id, ratna.ningtyas.mhs@unsoed.ac.id,
i.utama@mhs.unsoed.ac.id**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pola pembayaran dalam industri pariwisata di kabupaten Banyumas berbasis cashless management system pada saat pandemi Covid-19. Pariwisata adalah salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Dalam menyikapi pandemi Covid-19, pariwisata Indonesia dengan cepat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi, termasuk dalam pola transaksi. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu daerah yang terkenal akan potensi industri pariwisatanya sehingga penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai upaya industri pariwisata Banyumas dalam menghadapi perubahan pola transaksi yang terjadi saat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan konsep cashless management system dalam menganalisis upaya industri pariwisata Banyumas dalam menyikapi perubahan pola transaksi yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa industri pariwisata Banyumas menyikapi perubahan pola transaksi dengan menerapkan cashless management system untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang ingin berwisata di daerah Banyumas. Selain itu, penerapan cashless management system juga dilakukan untuk mawadahi masyarakat yang ingin melakukan transaksi non-tunai dan secara tidak langsung penerapan cashless management system akan membentuk iklim keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Banyumas, Covid-19, Non-Tunai, Pariwisata

ABSTRACT

This study aims to determine changes in payment patterns in the tourism industry in the Banyumas district based on a cashless management system during the Covid-19 pandemic. Tourism is one of the sectors affected by the Covid-19 pandemic. In response to the Covid-19 pandemic, Indonesian tourism has quickly adapted to the various changes that have occurred, including in transaction patterns. Banyumas Regency is one of the areas that is well-known for its tourism industry potential, so the author will further analyze the efforts of the Banyumas tourism industry in dealing with changes in transaction patterns that occurred during the Covid-19 pandemic. This study uses the concept of a cashless management system in analyzing the efforts of the Banyumas tourism industry in responding to changes in transaction patterns that occur. The method used in this paper is qualitative with a case study approach. The data collection technique used the library study method. Research shows that the Banyumas tourism industry responds to changes in transaction patterns by implementing a cashless management system to create a sense of security and comfort for tourists who want to travel in the Banyumas area. In addition, implementing a cashless management system is also carried out to accommodate people who wish to make non-cash transactions, and indirectly, applying a cashless management system will form a transparent and accountable financial climate.

Keyword: Banyumas, Cashless, Covid-19, Tourism

PENDAHULUAN

Kegiatan lintas negara dalam era globalisasi telah menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Salah satu kegiatan lintas batas yang dapat ditemui adalah kegiatan pariwisata. Setelah era Perang Dingin, berbagai motivasi dan sifat dari kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan akan mengarah pada adanya jenis pariwisata yang berbeda, menurut *World Tourism Organization* (UNWTO), jenis kegiatan pariwisata dapat dibagi menjadi beberapa segmen utama seperti *Sun & Beach Tourism*; ekowisata; dan sebagainya yang dimana masing-masing kategori dibagi lagi menjadi subkategori seperti wisata religi, wisata pengalaman, dan sebagainya. Menurut UNWTO, ada tiga bentuk dasar pariwisata, yaitu: pariwisata domestik; pariwisata inbound; dan wisata outbond. Bentuk ini dapat digabungkan dengan berbagai cara untuk mendapatkan bentuk tambahan pariwisata berikut ini: pariwisata internal; pariwisata nasional; dan pariwisata internasional (UNWTO, n.d).

Pariwisata kemudian berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi bagi negara dalam industri ekonomi global dimana menurut WTO, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia yang mengalami pertumbuhan, terhitung lebih dari sepertiga dari nilai total perdagangan jasa di seluruh dunia. Namun, semenjak pandemi COVID-19 yang mulai muncul pada Desember 2019, pariwisata menjadi salah satu industri yang mengalami paling banyak kerugian karena aktivitas *cross-border* baik dalam skala internasional maupun nasional yang dibatasi dalam skala besar. Dalam sepuluh tahun terakhir sebelum pandemi ini terjadi industri pariwisata global menghasilkan 1,5 triliun dolar (UNWTO, 2020a), sementara itu disisi lain industri pariwisata global memiliki tidak kurang 50 Juta lapangan kerja (BBC.com, 2020) yang mampu memberikan kesejahteraan bagi jutaan keluarga di seluruh dunia. Pertumbuhan industri pariwisata pun telah mencapai peningkatan 4% dari tahun sebelumnya (UNWTO, 2020a) dan mampu menyumbang sekitar 6,4 persen bagi ekonomi dunia.

Pandemi COVID-19 telah menjadi krisis kesehatan dan ekonomi yang berdampak buruk bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan negara-negara yang bergantung pada sektor pariwisatanya. Covid-19 merupakan jenis penyakit yang sangat menular dan memiliki masa inkubasi yang cukup lama. Pada awalnya virus ini teridentifikasi pada dua puluh tujuh kasus yang teridentifikasi dan dilaporkan pada 31 Desember 2019. Penyebaran yang begitu masif telah membuat 60 juta penduduk kota Wuhan dan beberapa

kota lainnya di China memberlakukan karantina wilayah atau *Lockdown* pada tanggal 23 Januari 2020, hal ini bahkan belum pernah diberlakukan pada epidemi virus sebelumnya yaitu SARS (Hong, et al., 2020). Fenomena tersebut membuat pemerintah berbagai negara berusaha untuk melindungi populasi mereka melalui upaya berupa lockdown, karantina, dan pembatasan besar pada mobilitas nasional maupun internasional yang telah diterapkan.

Dari sekian banyak sektor ekonomi yang diakumulasikan sebagai perhitungan ekonomi global, sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Sejak awal pandemi Covid-19 terjadi, penurunan yang signifikan terhadap seluruh kegiatan pariwisata secara global (Folinas & Metaxas, 2020). Penyebaran virus secara khusus memusatkan perhatian pada sifat pariwisata internasional yang mengglobal dan bagaimana sektor ini dapat terpengaruh oleh penyebaran virus. Pertumbuhan pariwisata internasional telah menjadi salah satu kekuatan yang paling signifikan yang mendorong ekonomi dunia sejak tahun 1950-an. Namun, berdasarkan data dari *UNWTO Tourism Dashboard*, jumlah mobilisasi kunjungan wisatawan mancanegara turun hingga 74% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah wisatawan mancanegara semakin menurun hingga 85% dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum terjadinya pandemic COVID-19 (UNWTO, 2021). Hal tersebut dikarenakan oleh meningkatnya kekhawatiran atas varian virus Delta telah menyebabkan beberapa negara menerapkan kembali tindakan pembatasan atau *lockdown*. Berkurangnya perjalanan pariwisata internasional memiliki perkiraan kerugian 1,3 triliun dolar AS dalam pendapatan ekspor yang dimana lebih dari 11 kali lipat kerugian yang tercatat selama krisis ekonomi global 2009. Krisis telah menempatkan antara 100 dan 120 juta pekerjaan pariwisata langsung dalam risiko, banyak dari mereka yang berasal dari usaha kecil dan menengah (UNWTO, 2021).

Di Indonesia sendiri semenjak kasus pertama COVID-19 pada Maret 2020 dan terus berkembang hingga sekarang, terhitung dalam kuartal pertama tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 2,97%, kemudian pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu berkisar pada -5,32% (Badan Pusat Statistik, 2020). Sedangkan dalam sektor pariwisatanya secara khusus, penurunan yang terjadi juga terasa sangat dalam, hal tersebut diakibatkan dari berhentinya kegiatan kepariwisataan dan segala sektor pendukungnya seperti halnya penerbangan, penutupan tempat wisata, berhentinya operasional hotel dan penginapan, dan lain sebagainya (Awirya, 2020). Penurunan pendapatan dari sektor pariwisata Indonesia lebih dari 29% dibanding

tahun sebelumnya dan menghilangkan ribuan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel, dan retailer juga terkena imbas dari pandemi Covid-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40% yang berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan usahanya (Purba, Fathiah, & Steven, 2021). Hal tersebut disebabkan oleh Indonesia yang telah membuat kebijakan pembatasan perjalanan ke dan dari negara-negara yang berada di zona merah penularan selama pandemi COVID-19 untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, langkah ini mengikuti kebijakan yang telah diterapkan oleh beberapa negara. Kebijakan pembatasan ini berdampak pada jadwal penerbangan, beberapa maskapai tidak membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa tetap melakukan penerbangan meskipun sebagian besar kursi pesawatnya tidak terisi untuk pemenuhan hak pelanggan (Purba, Fathiah, & Steven, 2021).

Pada tahun 2021, sektor pariwisata dunia maupun Indonesia mulai secara perlahan untuk dipulihkan meskipun tetap memberlakukan pembatasan perjalanan yang ketat termasuk regulasi *swab test* wajib, karantina dan dalam beberapa kasus penutupan perbatasan sepenuhnya, semuanya membebani dimulainya kembali perjalanan internasional. Pada saat yang sama, peluncuran vaksin COVID-19 secara bertahap diharapkan dapat membantu memulihkan kepercayaan konsumen, berkontribusi pada pelonggaran pembatasan perjalanan dan secara perlahan menormalkan perjalanan pariwisata (UNWTO, 2021). Maka dari itu, Indonesia telah memiliki langkah awal dalam mengurangi kerugian disektor pariwisata yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang memberikan beberapa stimulus dan beberapa petunjuk teknis mengenai protokol kesehatan melalui implementasi *Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment Friendly* di dunia pariwisata Indonesia guna meningkatkan kesiapan daerah dan industri pariwisata di daerah dalam menerapkan protokol kesehatan (DW, 2020).

Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment Friendly (CHSE) sendiri merupakan gagasan yang diintegrasikan oleh Kemenparekraf Indonesia yang bertujuan untuk pelaku industri pariwisata harus meningkatkan protokol kesehatan dan kebersihan di lokasi usahanya, demi memenuhi tuntutan konsumen usai pandemi berakhir. Protokol kesehatan yang berpedoman pada CHSE ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 dan juga Panduan WHO (Organisasi Kesehatan PBB) serta WTTC (Forum dunia untuk industri pariwisata) sebagai upaya pencegahan dan penanganan

COVID-19 yang berfokus pada tempat umum seperti fasilitas wisata. Implementasi dari prinsip CHSE yang digagas berdasarkan Keputusan Kementerian Kesehatan tersebut dapat berupa melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala pada seluruh area wisata, menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung, mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, mengoptimalkan implementasi *social distancing*, penggunaan masker, dan salah satunya adalah implementasi pembayaran non-tunai (KEMENKES, 2020).

Dapat diketahui bahwa sejak tahun 2020 mobilisasi gerak ke dari luar ke dalam negeri maupun mobilisasi dalam negeri telah dibatasi sehingga membuat pencapaian dalam sektor ekonomi semakin menurun. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki upaya untuk memulihkan pendapatan ekonomi negara melalui sektor ekonomi yang dijelaskan oleh Wishnutama Kusubandio selaku Menteri Pariwisata Indonesia yang menyatakan bahwa saat ini Kementerian yang dipimpinnya telah melakukan Langkah konkrit awal penyelamatan industri pariwisata Indonesia dengan berkoordinasi dengan beberapa pihak lainnya seperti memberikan insentif melalui diskon tiket pesawat antara 30% sampai 40% untuk 10 destinasi dalam negeri dari Maret hingga Mei 2020, yaitu Batam, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Silangit, Tanjung Pinang, dan Tanjung Pandan (BBC, 2020). Selain itu, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melakukan kerjasama dengan sektor lainnya yang berkaitan dengan pariwisata seperti jaringan hotel untuk dialihfungsikan menjadi tempat tinggal para tenaga medis dan gugus tugas di berbagai daerah sehingga kegiatan ekonominya tetap berlangsung (Mutiah, 2020).

Cara pemulihan ekonomi negara melalui sektor pariwisatanya dapat diupayakan dengan mengadaptasi konsep *Sustainable Tourism* atau Pariwisata Berkelanjutan yang diagendakan oleh UNWTO. *Sustainable Tourism* memiliki arti sebagai kegiatan pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. Panduan UNWTO juga menganjurkan negara-negara saat ini untuk fokus kepada pasar turis lokal hingga nantinya destinasi wisata siap sepenuhnya dibuka untuk pasar yang lebih besar yakni wisata mancanegara (DW, 2020). Selain mengintegrasikan konsep *sustainable tourism* dan memberdayakan kegiatan pariwisata dalam negeri, di era *New Normal* ini memberikan kesempatan banyak negara untuk melakukan integrasi penggunaan teknologi secara langsung di industry pariwisata. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan globalisasi yang menjadikan teknologi sebagai salah satu sektor utama yang paling mudah dimanfaatkan

untuk mendapatkan banyak keuntungan secara lebih mudah. Dengan adanya pandemi Covid-19, semakin jelas bahwa aspek digitalisasi mutlak sangat penting untuk diadaptasi dalam sektor pariwisata, dan bukan hanya suatu fase sementara yang akan berangsur hilang seiring datangnya new normal. Strategi penggunaan teknologi dalam sektor pariwisata akan diintegrasikan melalui konsep E-Tourism 4.0. E-Tourism mengacu pada sebuah fenomena di mana adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh wisatawan dan bisnis memiliki kemampuan untuk mengubah proses dan rantai nilai dalam industri pariwisata (Buhalis & Jun, 2011) dan erat kaitannya dengan dengan internet, kesiapan infrastruktur, responsivitas sumber daya manusia dan kolaborasi paripurna dengan stakeholder lain merupakan kunci utama.

Salah satu upaya signifikan yang bisa dilakukan sebagai bentuk implementasi sustainable tourism di Indonesia adalah dengan menerapkan protokol CHSE di berbagai wilayah lokal untuk membangkitkan industri pariwisata domestik. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Artikel ini menganalisis bagaimana implementasi penerapan protokol CHSE dalam pariwisata melalui perubahan sistem pembayaran tunai menjadi sistem pembayaran tanpa tunai atau cashless sebagai bentuk upaya reformasi dan peningkatan sektor industri pariwisata di Indonesia pada era new normal pandemi COVID-19.

KERANGKA ANALISIS

Konsep *Cashless Management System*

Cashless management system adalah sebuah konsep yang muncul ketika maraknya fenomena *cashless society*. Untuk memahami konsep *cashless management system*, penting halnya untuk mengetahui penjelasan dari masing-masing konsep penyusunnya. Pertama, *cashless* sendiri merujuk pada sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses transaksi yang berbentuk non tunai (Marlin et al, 2020). Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan transaksi non-tunai dalam kehidupan sehari-hari maka fenomena *cashless society* semakin massif. Sementara itu, Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah (2008) dalam bukunya menjelaskan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan suatu sistem untuk mencapai sebuah tujuan. Adanya konsep manajemen digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang menggambarkan proses yang secara structural dan sistematis dalam menyelesaikan sebuah persoalan dan mencapai target-target tertentu. Selanjutnya, konsep dasar system merujuk

pada suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi dan terkait untuk membentuk keseluruhan yang kompleks (Susanto, 2004). Melalui penjelasan tersebut, *cashless management system* dapat dijelaskan sebagai sebuah perencanaan dan pengorganisasian yang berbasis proses transaksi non tunai dan secara keseluruhan saling terkait untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah sesuai dengan peran penggunaan *cashless management system* di balik peran utamanya sebagai sarana transaksi, misalnya perannya dalam industri pariwisata, kesehatan, maupun sosial.

Sebagai sebuah proses transaksi non tunai, *cashless management system* juga seringkali dikaitkan dengan *digital payment*. Banyak ahli yang juga menyebutkan bahwa *cashless management system* adalah nama lain dari *digital payment*. Misalnya melalui Tarantang (2019) yang menjelaskan *digital payment* sebagai sebuah system yang di dalamnya terdapat sarana instruksi pembayaran, seperti kontrak, peraturan, teknis, dan fasilitasi lainnya untuk membantu kelancaran transaksi pembeli dan penjual. Lebih lanjut, transaksi yang dimaksud adalah perpindahan uang yang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan system yang dibangun menggunakan telepon pintar dengan basis internet, di mana uang yang berpindah tersebut tidak melibatkan bentuk fisik dari uang atau kita kenal dengan istilah non tunai (Lubis, 2019) (Saragih, 2019). Meskipun di sisi lain, terdapat juga pemahaman bahwa *cashless management system* adalah wadahnya dan *digital payment* adalah alatnya karena *digital payment* merujuk pada alat-alat transaksi non-tunai, seperti *internet banking*, *mobile banking*, *sms banking*, maupun uang elektronik. Oleh karena itu, konsep *cashless management system* maupun *digital payment* adalah dua konsep yang sebenarnya sama dan saling berkaitan karena menyangkut mengenai proses transaksi non tunai yang secara sistematis, terorganisasi, dan structural berorientasi pada tujuan tertentu.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif di mana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dalam hal ini adalah pola pembayaran dalam industry pariwisata di kabupaten Banyumas dalam menuju *cashless management system*. Untuk menganalisa data dan sumber data dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel daring yang berbasis ruang lingkup

penelitian. Sementara itu, penulis menggunakan Teknik analisis data dengan model analisis penelitian kualitatif oleh Miles dan Huberman dimana akan terdapat tiga tahapan, yaitu pertama adalah reduksi data dimana penulis akan melakukan pengolahan data yang didapatkan untuk lebih difokuskan dan dipertajam sesuai dengan kebutuhan penelitian khususnya yang berkaitan dengan perubahan pola pembayaran dengan *cashless management system* di Kabupaten Banyumas. Kedua, setelah data direduksi, penulis akan melakukan penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif dalam memperkuat argumen. Ketiga, penulis akan menarik kesimpulan sehingga mendapatkan data yang dapat dikorelasikan dengan kerangka konseptual yang digunakan.

PEMBAHASAN

Cashless Management System di Industri Pariwisata Indonesia

Internet dan digitalisasi menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan akibat kemampuan pergerakan semua sektor termasuk pariwisata nasional. Pada masa pandemi, seolah digitalisasi menjadi “pelarian” semata dari dimensi *offline* dan merupakan hal baru dalam industri pariwisata yang mungkin luput dari kajian maupun perencanaan yang sudah ada. Wishnutama melansir bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang sebagian besar masyarakatnya memiliki kebiasaan menggunakan platform online di masa pandemi ini dapat menjadi kesempatan bagi para penyelenggara pariwisata untuk menggali potensi era digital. “Suka tidak suka, mau tidak mau, era digitalisasi ini makin terakselerasi dengan cepat, terlebih dengan kondisi ini semua dipaksa untuk memahami digital lebih cepat,” (Safriana, 2020).

Rintisan peta E-Tourism 4.0 sejatinya telah mulai cukup intensif digelorkan pada era Kementerian Pariwisata dibawah kepemimpinan Arief Yahya era jilid 1 Presiden Joko Widodo. Rencananya cukup familiar dan menarik, dengan mengusung strategi besar yang meliputi *Strategic Theme: Wonderful Indonesia Digital Tourism 4.0; Strategic Imperatives for Transforming Tourism HR to Win Global Competition in Industry 4.0; 5 Technology Enabler; 9 Key Initiatives for Discipline Executions; dan Pentahelix Collaboration Approach*. Kolaborasi seluruh strategi tersebut diharapkan mampu mendorong pengembangan E-tourism 4.0 Indonesia sehingga menjadi kian berkembang dan dikenal dunia (Safriana, 2020).

Mengintegrasikan agenda digitalisasi dalam sektor pariwisata merupakan sebuah inovasi yang bagus, namun di Era *New Normal* dimana mobilisasi langsung dan aktivitas

lintas negara yang mulai dilakukan kembali secara restriktif membuat kedisiplinan menjadi kunci bagi dunia pariwisata untuk menghadapi era *New Normal* pada pandemi Covid-19. Kedisiplinan harus dimiliki oleh wisatawan maupun para pelaku industri pariwisata agar semua protokol kesehatan dipatuhi, sehingga keselamatan dan keamanan semua orang dapat terjaga. Selain menjaga keselamatan dan keamanan bersama, kedisiplinan diri sendiri bisa menghindari resiko terburuk yang mungkin terjadi, yaitu Gelombang Kedua Covid-19. Karena ketika destinasi wisata sudah dibuka, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara semuanya tetap memiliki resiko (Widodo, 2020).

Seperti anjuran dari Kementerian Kesehatan tentang protocol CHSE yang implementasinya di sektor pariwisata bisa dilakukan melalui penerapan pembayaran non-tunai, Indonesia semakin mengembangkan metode tersebut sebagai upaya untuk mengurangi persebaran virus COVID-19 melalui uang tunai. Jasa pembayaran non-tunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank baik proses pengiriman dana, penyelenggara kliring, maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan sistem kliring.

Perkembangan pembayaran non-tunai merupakan konsep yang biasa digunakan oleh komunitas non-tunai atau *cashless society* yang merupakan komunitas masyarakat yang dalam bertransaksi, tidak lagi menggunakan uang fisik, melainkan melalui perpindahan informasi finansial secara digital (uang digital) (Bintarto, 2018). Secara umum telah berkembang sebagai inovasi yang bertujuan untuk mengalihkan proses pembayaran tunai yang dinilai sebagai metode tradisional yang sudah tidak lagi efisien. Perkembangan metode pembayaran non-tunai ini dipengaruhi oleh adanya fasilitas infrastruktur teknologi informasi yang memberikan fondasi pada sistem pembayaran non-tunai yang menekankan proses transaksi ekonomi di mana semua jenis transaksinya dapat dilacak dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ekonomi negara di mana pertumbuhan inklusif dapat diintegrasikan (Passah & Kumar, 2019).

Penggunaan metode transaksi pembayaran non-tunai semakin marak digunakan oleh pemerintah negara, salah satunya Indonesia, untuk membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel juga untuk menghindari praktik korupsi (Kurniati & Nugroho, 2019). Selain digunakan dalam birokrasi pemerintahan negara, metode pembayaran non-tunai juga sering ditemui pada sektor-sektor fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan hingga pariwisata. Metode transaksi tanpa uang tunai yang terlibat dalam pembelian barang dan jasa di sektor

pariwisata sangat penting untuk keberhasilan sektor pariwisata di era pandemic. Metode transaksi non-tunai yang paling umum dalam e-tourism adalah kartu debit dan kredit, *E-wallet, internet banking, unified payment interface (UPI)* (Husain, Varshney, Bhatnagar, & Satsangi, 2019).

Pembayaran non-tunai atau *cashless* sebenarnya telah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena semakin banyak pusat-pusat kegiatan ekonomi yang menyediakan fasilitas pembayaran secara non-tunai. Alat pembayaran non tunai yang berkembang saat ini dapat berupa di antaranya adalah kartu kredit, kartu debit, ATM yang secara umum sudah dikenal oleh masyarakat luas. Sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat akan kemudahan dalam bertransaksi, kini dunia perbankan telah memberikan solusi dengan inovasi-inovasi baru pada masyarakat dalam bertransaksi. Perkembangan jumlah penggunaan transaksi pembayaran non tunai semakin bertambah, dapat dilihat dari perkembangan jumlah volume Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang beredar di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan masifnya penggunaan transaksi non-tunai maka industri pariwisata di Indonesia telah bertransformasi untuk menerapkan *cashless management system* dalam mengoperasikan industrinya. Alasan dari penerapan *cashless management system* tidak semata-merta untuk mewadahi masyarakat yang sudah banyak bertransisi ke system pembayaran non tunai, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan manajemen dari pengelolaan keuangan di industri pariwisata tersebut. Oleh karena itu, penerapan *cashless management system* pada industri pariwisata Indonesia merupakan bentuk progresifitas dalam menjawab perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat.

Cashless Management System di Industri Pariwisata Kabupaten Banyumas

Kegiatan pariwisata yang dilakukan secara langsung harus memberikan gagasan bahwa kegiatan tersebut aman untuk dilakukan di era *New Normal* dengan berbagai regulasi yang ketat sehingga terhindar dari transmisi penyebaran virus COVID-19 saat melakukan kegiatan pariwisata. Memberdayakan kembali sektor pariwisata daerah merupakan prinsip penting untuk memulihkan sektor ekonomi negara. Kabupaten Banyumas adalah salah satu daerah di Indonesia yang mengembangkan potensi industri wisatanya. Melihat kondisi geografisnya, Kabupaten Banyumas memiliki keanekaragaman di dalam industri wisata alam, selain itu juga terdapat fasilitas wisata budaya dan wisata religi (Hermawati &

Milawaty, 2016). Fasilitas wisata di Kabupaten Banyumas cocok dikunjungi bersama keluarga maupun perorangan, contohnya seperti Lokawisata Baturraden dan Telaga Sunyi sebagai fasilitas wisata alam serta Museum Wayang Sendhang Mas sebagai fasilitas wisata budaya. Tentunya pertumbuhan potensi industri pariwisata di Kabupaten Banyumas mendongkrak sektor perekonomian lainnya sehingga perkembangan jumlah hotel dan hunian di Kabupaten Banyumas juga meningkat. Persebaran virus COVID-19 yang memasuki Indonesia pada bulan Maret memberikan efek domino ke seluruh wilayah negara, termasuk Kabupaten Banyumas yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Pada awal terjadinya pandemi COVID-19, persebaran virus cukup pesat di Kabupaten Banyumas sendiri sampai menciptakan banyak kluster dari kluster pasar hingga kluster perkantoran seperti yang dikatakan oleh Bupati Banyumas pada bulan Mei tahun 2020 (Antara News, 2020). Sejak bulan Maret 2020 hingga Agustus 2021, sebanyak 1.859 orang dinyatakan meninggal dunia karena Covid-19 (Marhaeningsih, 2021). Untuk menanggapi hal tersebut, Kabupaten Banyumas telah mengintegrasikan kegiatan PSBB dan PPKM sesuai dengan peraturan pusat dengan harapan mengurangi angka dan menekan penyebaran virus COVID-19 (Sumarwoto, 2021).

Pemerintah Kabupaten Banyumas tentunya tidak ingin sektor pariwisatanya terus terpuruk. Maka dari itu, perlu mengembangkan sebuah cara sebagai upaya recovery sektor pariwisata yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Kabupaten Banyumas dalam upaya memulihkan perekonomiannya melalui sektor pariwisata telah meluncurkan pola pembayaran non-tunai (*cashless*) di setiap objek wisata dan industri pariwisata Banyumas melalui aplikasi QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*), sebuah aplikasi pemindai barcode milik Bank Indonesia yang diterapkan oleh Ir. Ahmad Husein selaku Bupati Banyumas Bersama dengan Bank Indonesia (BI) wilayah Banyumas dan sekitarnya (Yandip Prov. Jateng, 2020). Upaya mengintegrasikan sistem pembayaran non-tunai di setiap objek wisata di Kabupaten Banyumas mulai diterapkan berdasarkan perhatian bahwa perputaran uang tunai yang beredar bisa jadi menjadi media tersebarnya virus COVID-19 menjadi lebih luas. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto pun telah menyatakan bahwa aplikasi QRIS ini diluncurkan sebagai bagian dari program digitalisasi aplikasi, dan saat ini penetrasi telepon selular di Indonesia telah menempati peringkat kedua di ASEAN setelah Singapura, sehingga tidak mengherankan *Financial Technology (fintech)* menjadi suatu terobosan sekaligus gaya hidup baru dalam masyarakat modern. Terlebih di

Banyumas saat ini telah tersedia 32 ribu *merchant* atau pelaku usaha yang menggunakan QRIS (Yandip Prov. Jateng, 2020).

Penerapan metode pembayaran non-tunai di sektor pariwisata Banyumas ini memiliki urgensi berupa pencegahan transmisi dan persebaran virus COVID-19 melalui media uang tunai di era pandemic sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan dalam implementasi protokol kesehatan. Selain itu, Kabupaten Banyumas tentunya tentunya tidak ingin terus mengalami keterpurukan dan kerugian baik bagi neraca pendapatan daerah, maupun bagi pergerakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas yang juga banyak ditopang oleh industri pariwisata dan segala sektor penunjangnya, maka dari itu, terobosan kebijakan melalui pola pembayaran non-tunai atau *cashless management system* serta memasarkan keunggulan pariwisata Banyumas melalui platform *e-tourism* menjadi suatu keniscayaan ditengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Kebijakan pembayaran non-tunai di sektor pariwisata juga akan memberikan peluang kepada Kabupaten Banyumas sebagai salah satu upaya menggerakkan kembali perekonomian di sektor pariwisata dan membangkitkan industri pariwisata dan sektor-sektor pendukung dan penunjangnya, sekaligus berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan membatasi penggunaan transaksi tunai.

Integrasi pembayaran non-tunai pada sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas memang telah semakin dikembangkan dan diintegrasikan. Namun, itu bukan berarti bahwa Kabupaten Banyumas tidak menemui berbagai kendala dalam implementasi metode pembayaran non-tunai khususnya di sektor pariwisata. Rata-rata masyarakat Kabupaten Banyumas tergolong dalam kategori masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut mempengaruhi literasi keuangan mereka, di mana akan berpengaruh pada jumlah masyarakat yang menggunakan layanan pembayaran non-tunai melalui *m-banking* atau *platform* lainnya menjadi tidak banyak. Kendala yang paling sering ditemui adalah mengingat bahwa Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang memiliki wilayah terpencil sehingga kendala sering ditemui pada sinyal yang tidak stabil di berbagai daerah sehingga akses ke *m-banking* atau *platform* pembayaran non-tunai lainnya mudah terhambat (Suara Purwokerto, 2020). Hal tersebut dapat dianalisis sebagai salah satu alasan masyarakat Kabupaten Banyumas lebih nyaman untuk menggunakan metode pembayaran tunai.

Adanya inovasi tersebut membuat orang-orang akan lebih dengan mudah untuk melakukan kegiatan pariwisata dan pastinya lebih terlindung dari paparan virus COVID-19

yang bisa disalurkan melalui uang tunai ditambah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan restriktif di tempat wisata. Langkah tersebut merupakan salah satu langkah yang bagus untuk mulai memulihkan perekonomian Indonesia melalui sektor pariwisata daerah. Dengan demikian, adanya *cashless management system* yang diterapkan melalui penggunaan transaksi non-tunai di industri pariwisata kabupaten Banyumas menjadi salah satu jawaban untuk mengembangkan pariwisata di tengah pandemic COVID-19. Penerapan *cashless management system* di tengah pandemic COVID-19 tidak hanya dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang menggunakan transaksi non-tunai, tetapi juga dilatarbelakangi oleh alasan keamanan dan kenyamanan dari masyarakat. Hal ini karena pada saat pandemic COVID-19, virus dapat menular melalui media apapun, termasuk pada media uang sehingga dengan adanya transaksi non-tunai maka akan memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk tetap melakukan wisata tanpa ada rasa takut tertular virus Covid-19 melalui sarana uang. Selain alasan keamanan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, penerapan *cashless management system* di industri pariwisata Banyumas juga akan mendukung perkembangan wisata menuju *tourism 4.0* sehingga penerapan *cashless management system* di industri pariwisata Banyumas membantu untuk mengikuti berbagai perubahan yang terjadi.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kerugian pada berbagai sektor, salah satunya pada sektor pariwisata. Keberadaan pandemi Covid-19 telah menciptakan perubahan perilaku dari masyarakat, termasuk cara masyarakat dalam melakukan transaksi. Hal ini dilakukan karena transaksi dengan menggunakan uang memiliki potensi besar untuk meningkatkan penularan terhadap virus Covid-19. Dalam menyikapi persoalan ini, muncullah sebuah fenomena yang dikenal dengan *cashless society* dimana masyarakat tidak lagi menggunakan transaksi tunai, tetapi beralih dengan menggunakan transaksi non-tunai. Perubahan pola perilaku transaksi yang terjadi di masyarakat disikapi dengan baik oleh industri pariwisata di Indonesia, salah satunya di daerah Banyumas. Industri pariwisata di daerah Banyumas mulai menerapkan *cashless management system* dimana pihak pariwisata mewadahi masyarakat yang ingin melakukan transaksi non-tunai. Alasan utama pihak pariwisata Banyumas menerapkan *cashless management system* adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan karena langkah ini mampu memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Selain itu, penerapan *cashless management system* juga merupakan bentuk langkah progresif

dari pariwisata Banyumas dalam menyambut *tourism 4.0* sehingga terciptanya system pariwisata yang transparan dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2020, Mei 20). *Bupati berharap tidak ada lonjakan COVID-19 di Banyumas usai Lebaran*. Retrieved Oktober 4, 2021, from Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/2165394/bupati-berharap-tidak-ada-lonjakan-covid-19-di-banyumas-usai-lebaran>
- Awirya, A. A. (2020). *DAMPAK PENURUNAN KEGIATAN PARIWISATA TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA*. Retrieved from Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/340117775_DAMPAK_PENURUNAN_KEGIATAN_PARIWISATA_TERHADAP_KETENAGAKERJAAN_DI_INDONESIA
- Badan Pusat Statistik. (2020, Mei 5). *Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>
- Bintarto, E. A. (2018). *Fintech dan Cashless Society : Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Buhalis, D., & Jun, S. H. (2011). E-Tourism. *Contemporary Tourism Reviews*, 1-30.
- DW. (2020). *Bagaimana Sektor Pariwisata Indonesia Bertahan di Tengah Pandemi Corona*. Retrieved from DW: <https://www.dw.com/id/bagaimana-pariwisata-indonesia-bertahan-di-tengah-pandemi/a-54818132>
- Folinas, S., & Metaxas, T. (2020). Tourism: The Great Patient of Coronavirus COVID-2019. *Munich Personal RePEc Archive*, 1-14.
- Hong, Y., Cai, G., Mo, Z., Gao, W., Xu, L., Jiang, Y., et al. (2020). The Impact of COVID-19 on Tourist Satisfaction with B&B in Zhejiang, China: An Importance–Performance Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10), 1-19.
- Husain, A., Varshney, T., Bhatnagar, S., & Satsangi, A. K. (2019). E-SATISFACTION TOWARDS CASHLESS TRANSACTIONS: RE-TESTS MODEL FOR E-TOURISM. *International Journal of Advance and Innovative Research*, 6(2), 1-11.
- KEMENKES. (2020, Juni 19). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 - Regulasi*. Retrieved Agustus 31, 2021, from Covid19.go.id: <https://covid19.go.id/p/regulasi/keputusan-menteri-kesehatan-nomor-hk0107menkes3822020>
- Kurniati, P. N., & Nugroho, B. Y. (2019). Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 136-150.

- Marhaeningsih, I. (2021, September 5). *Angka Kasus Covid-19 di Banyumas Terus Menurun*. Retrieved Oktober 4, 2021, from RRI: <https://rri.co.id/daerah/1177555/angka-kasus-covid-19-di-banyumas-terus-menurun>
- Passah, D. R., & Kumar, A. (2019). Cashless Economy and Digitalization of Tourism & Hospitality Practices in India. *Proceedings of 10th International Conference on Digital Strategies for Organizational Success*, 453-464.
- Purba, J. H., Fathiah, R., & Steven. (2021, Maret). THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE TOURISM SECTOR IN INDONESIA. *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, 3 (1), 389 - 401.
- Safriana, L. (2020, Juni 30). *New Normal, Peta e-Tourism 4.0 dan Kemandirian Bangsa*. Retrieved from Opini Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/redaksi/indepth/5ef9ce654ac50/new-normal-peta-e-tourism-40-dan-kemandirian-bangsa>
- Suara Purwokerto. (2020, Oktober 5). *Wabup Resmikan Pembayaran Non Tunai Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor*. Retrieved Agustus 31, 2021, from Suara Purwokerto: <https://www.suarapurwokerto.com/banyumas/4092/wabup-resmikan-pembayaran-non-tunai-pelayanan-uji-kendaraan-bermotor>
- Sumarwoto. (2021, Juli 9). *Berharap dari pelaksanaan PPKM Darurat di Banyumas*. Retrieved from Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/2258530/berharap-dari-pelaksanaan-ppkm-darurat-di-banyumas>
- UNWTO. (2021, Januari 28). *2020: WORST YEAR IN TOURISM HISTORY WITH 1 BILLION FEWER INTERNATIONAL ARRIVALS*. Retrieved from Barometer UNWTO: <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-01/210128-barometer-en.pdf?Ga11QTYG.Ky9LDZ2tDKc.iRZkinJeuH>
- UNWTO. (2021, Juni 2). *TOURIST NUMBERS DOWN 83% BUT CONFIDENCE SLOWLY RISING*. Retrieved from Barometer | UNWTO: <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-06/210602-unwto-barometer-en.pdf?rNy0Q9kCLL.4MgS3dLIc8vpDxNCUt7LY>
- UNWTO. (n.d). *UNWTO Tourism Definitions*. Retrieved April 17, 2021, from UNWTO: <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420858>
- Widodo, W. S. (2020, Juni 3). *Disiplin, Kunci Dunia Pariwisata Hadapi Era New Normal*. Retrieved from detikTravel: <https://travel.detik.com/travel-news/d-5038445/disiplin-kunci-dunia-pariwisata-hadapi-era-new-normal>
- Yandip Prov. Jateng. (2020, September 11). *Berwisata dan Belanja Nontunai dengan QRIS*. Retrieved from Portal Berita Pemerintah Jawa Tengah: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/berwisata-dan-belanja-nontunai-dengan-qrisk/>
- Marlina, L., Mundzir, A., & Pratama, H. (2020). Cashless dan Cardless Sebagai Perilaku Transaksi di Era Digital. *Co-Management Journal*, 3(2), 533-542.
- Sule, E., & Saefullah, K. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Tarantang, J., Awaaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 1(1).

- Saragih, S. (2019). Technology Acceptance of Digital Payment System pada Pelaku UMKM di Kota Batam. *Computer Based Information System Journal*, 7(2), 82-90.
- Lubis, N. (2019). Pengaruh Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Era Digital terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia.
- Susanto, A. (2004). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Linggar Jaya.